

**MODEL PENDIDIKAN PANCASILA DI KAMPUS BELA NEGARA
(PENGUATAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN)
(Studi di UPN Yogyakarta)**

Lestanta Budiman¹

Pusat Studi Pancasila, Universitas Pembangunan Nasional, Yogyakarta
Email: adilobo@gmail.com

ABSTRAK

Pancasila merupakan dasar negara yang keberadaannya sudah final menjadi jati diri dan dasar negara Republik Indonesia. Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta telah menegaskan dirinya sebagai kampus bela negara memiliki peran yang strategis dan fundamental dalam melahirkan calon-calon pemimpin bangsa. Sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang meletakkan jati diri dan filosofi bela negara berdasarkan Pancasila. UPN Yogyakarta telah mendirikan dan merintis berdirinya Pusat Studi Pancasila sebagai motor penggerak dan *think tank* dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus.

Pendidikan Pancasila menjadi suatu pendasaran yang penting dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kejuangan di kalangan generasi muda khususnya civitas akademika UPN Yogyakarta. Dinamika dan perubahan zaman, telah membawa arus perubahan dan mind set generasi muda terjebak pada persoalan-persoalan yang sifat *absurd* dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib diajarkan di UPN Yogyakarta untuk membekali peserta didik memahami seluk beluk bangsa dan ancaman ideologis yang berpotensi pada perpecahan dan konflik antar anak bangsa. Isu radikalisme, fundamentalisme, dan terorisme menjadi wacana yang semakin menunjukkan bahwa ideologi asing mulai masuk dan mengubah *mind set* generasi muda untuk menjadi kaum radikal, fundamentalis dan tidak berkepribadian dalam kebudayaan Indonesia. UPN Yogyakarta telah menerapkan model Pendidikan Pancasila yang bertujuan untuk menguatkan karakter mahasiswa dalam hal penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Kata kunci : *Kampus, Bela Negara, UPN, Pancasila, Pendidikan, Perguruan Tinggi.*

PENDAHULUAN

Pendidikan Pancasila menjadi di tingkat Perguruan Tinggi mulai kembali diperkenalkan melalui dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengamanatkan mata kuliah Pendidikan Pancasila menjadi mata kuliah wajib pada Perguruan Tinggi di Indonesia. Namun dalam konteks pelaksanaan paska Pendidikan Pancasila ditiadakan melalui

¹ Kepala Pusat Studi Pancasila UPN Veteran Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional. Berbagai tanggapan dan reaksi dari perguruan tinggi di Indonesia beragam. Bagi perguruan tinggi yang mengikuti aturan Undang-Undang tersebut langsung melakukan penyesuaian dan perubahan dengan menghapus mata kuliah Pancasila di Perguruan Tingginya, sebagian mempertahankan dengan menggabungkan mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi PPkn. Beberapa Perguruan Tinggi masih tetap konsisten menggunakan mata kuliah Pancasila dalam pengajaran di kelas.

Sejak perubahan dasar hukum terkait dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi mulai dari tahun 2003 sampai dengan 2012 telah membawa perubahan paradigmatis terhadap proses pengajaran, metode, dan pengembangan bahan ajar Pancasila di Perguruan Tinggi. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPN V) Yogyakarta telah menegaskan sebagai universitas bela negara memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam membela dan mengembangkan Pancasila sebagai *core values* dalam semua kebijakan kampus dan mata kuliah yang diberikan. Sejak terjadi perubahan dasar hukum terkait pendidikan Pancasila melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, UPN Veteran Yogyakarta tetap melaksanakan dan mengajarkan Pancasila sebagai mata kuliah wajib bagi mahasiswa. Pendidikan Pancasila dinilai memiliki peran penting dalam membentuk karakter mahasiswa agar memiliki dasar-dasar nilai bela negara, dasar nilai ideologi kebangsaan yang kokoh, dan mempunyai pola pikir untuk memajukan bangsa dan negara. Hal ini untuk menunjukkan komitmen UPN Veteran Yogyakarta mengemban visi dan misi sebagai kampus bela negara yang baru dicanangkan. Berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa pasca reformasi 1999 dan hilangnya mata kuliah Pancasila di Perguruan Tinggi menyebabkan berbagai persoalan sosial, kemanusiaan, dan disorientasi nilai hidup bersama mulai luntur. Sebagaimana Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis lima kasus kekerasan terburuk pasca reformasi tahun 1998. Kurang lebih 10 ribu orang dilaporkan meninggal dalam kerusuhan sosial. Sementara kurang lebih 100 ribu warga lainnya mengungsi dari kampung mereka ke wilayah aman. Lima kasus

tersebut antara lain:1). Kasus konflik Maluku dan Maluku Utara;2). Kasus konflik sampit terjadi tahun 2001.3). kasus kerusuhan Mei 1998 di Jakarta;4). Kasus transito Mataram;5). Kasus konflik lampung selatan, tahun 2012². Selain itu, di sela-sela kasus konflik sosial muncul kasus terorisme yang menyerang Indonesia yaitu: kasus bom bali I terjadi pada tahun 2002, sebanyak 202 orang tewas dan 209 lainnya luka-luka³. Pada tahun 2005, terjadi kembali aksi teror bom bali jilid 2 di pulau Bali yang menewaskan 23 orang⁴.

Fenomena yang terjadi di masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara di atas merupakan sebagian potret dan salah satu akibat terlalu terbukanya ruang bagi masuknya ideologi-ideologi lain ke Indonesia termasuk berbagai kasus yang akhir-akhir ini memasuki wilayah kampus yaitu ide radikalisme, fundamentalisme, bahkan terdapat kelompok akademisi anti-Pancasila dan ingin mendirikan negara *khilafah*. Pengabaian terhadap pendidikan Pancasila di dunia pendidikan telah berdampak pada pembangkangan sosial dan ideologis oleh kelompok-kelompok lain yang sudah lama akan mengganti dasar negara Indonesia yang bersifat final. Pendidikan Pancasila selalu dianggap tidak penting dan disingkirkan, sejak saat itu, beragam institusi pendidikan mulai membangkang dan menolak Pancasila termasuk lahirnya sekolah-sekolah swasta yang tidak mau mengajarkan Pancasila, munculnya model pengajaran Pancasila dan kewarganegaraan berbasis nilai-nilai eksklusivitas. Problem Pendidikan Pancasila pasca reformasi ditemukan yaitu: *pertama*, Pendidikan Pancasila diperhadapkan pada inkonsistensi penggunaan istilah mulai dari PPKn, Kewarganegaraan, pilar kebangsaan, dan konsensus dasar. *Kedua*, muncul istilah baru yang digunakan oleh MPR dengan menyebut Pancasila sebagai pilar. Hal ini menjadi persoalan terhadap hakekat dan pengertian Pancasila yang sebenarnya, karena Pancasila dianggap sebagai pilar. *Ketiga*, materi pendidikan Pancasila yang

² <https://news.detik.com/berita/2125635/lima-kasus-konflik-sosial-terburuk-pasca-1998>, diakses 9 Juni 2018 16:59.

³ <http://mediaindonesia.com/read/detail/126861-2002-tragedi-bom-bali-1>, diakses 9 Juni 2002 17:02.

⁴<https://www.liputan6.com/global/read/2329497/1-10-2005-bom-bali-2-renggut-23-nyawa>, diakses 9 Juni 2002 17:02.

diajarkan di Perguruan Tinggi beragam dan cenderung tidak sama setiap dosen. Sehingga, materi pendidikan Pancasila sering menjadi persoalan di kelas karena belum memenuhi unsur-unsur substansial terkait dengan Pancasila. Terdapat pengajaran Pancasila justru memperlemah penguatan Pancasila. Sama halnya dengan pendidikan agama justru mengajarkan anti negara.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari persoalan di atas penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model pendidikan Pancasila yang dikembangkan di Perguruan Tinggi sejak pasca reformasi?
2. Bagaimana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta sebagai kampus bela negara mengembangkan Pendidikan Pancasila?

Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait dengan perkembangan pendidikan Pancasila yang diajarkan di Perguruan tinggi sejak pasca reformasi.
2. Untuk mendeskripsikan tentang model dan metode pendidikan Pancasila yang diajarkan di UPN Veteran Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis kritis. Peneliti menganalisis teks dan realitas yang ada dengan merumuskan dalam kerangka pikir ilmu Kepancasilaan. Data penelitian ini diperoleh melalui kajian pustaka dan tindakan kelas yang dilakukan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta dan Universitas Pembangunan nasional Veteran Yogyakarta. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni 2018. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode induktif-deduktif, heuristik, dan interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila merupakan pendidikan yang membahas dan mempelajari Pancasila sebagai dasar filosofi dan nilai-nilai kehidupan bersama sebagaimana terdapat dalam nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Pancasila didefinisikan sebagai dasar negara bangsa Indonesia yang memiliki fungsi dan kedudukan sebagai dasar dalam pembentukan negara Indonesia dan penyelenggaraan negara. Pancasila juga dikatakan sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, serta sumber dari segala sumber hukum positif di Indonesia (Sutono, 2015:669).

Pendidikan Pancasila sebagai dasar dalam pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan karakter bangsa memiliki dasar filosofis yang kuat yaitu dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pada aspek ontologis, Pancasila memiliki *causa material* yaitu realitas kehidupan bangsa Indonesia. Secara khusus dasar ontologis Pancasila ialah manusia Indonesia yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Sehingga, nilai-nilai Pancasila merupakan kristalisasi dan wujud dari ekspresi kehidupan masyarakat Indonesia.

Pada aspek epistemologis, sumber pengetahuan Pancasila terdapat pada adat-istiadat, seta kebudayaan dan nilai-nilai religius bangsa Indonesia (Sutono, 2015:674;Kaelan, 2013:148). Sedangkan aspek aksiologis, nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila merupakan cita-cita, harapan, dambaan bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam kehidupan masyarakat dan negara, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh (Kaelan dalam Sutono, 2015:676). Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Sumber nilai-nilai Pancasila berasal dari kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan kenegaraan (Asmaroini,2016 :443).

2. Model Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Pasca Reformasi

Pendidikan Pancasila mulai dikenal sejak lahirnya Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa). Materi ketetapan MPR RI menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan Pancasila yang dulu dikenal dengan Pendidikan Moral Pancasila dan P4 menjadi mata pelajaran wajib di institusi pendidikan termasuk ditujukan bagi semua penyelenggara negara. Filosofi dasar pendidikan moral Pancasila pada waktu itu, lebih untuk mengenalkan dan menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat atau kehidupan sehari-hari. Namun sejak Ketetapan MPR RI No.II/MPR/1978 dicabut melalui Ketetapan MPR RI No.XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan TAP MPR No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara telah melahirkan babak baru dalam proses pengajaran dan model pendidikan Pancasila di dunia pendidikan.

Model dan pengajaran pendidikan Pancasila di dunia pendidikan mengalami pergeseran paradigmatic, Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan karakter bangsa dan proses penanaman nilai-nilai kebangsaan kemudian diganti menjadi pendidikan kewarganegaraan yang secara substansi lebih mengarahkan nilai-nilai civitas umum seperti politik, demokrasi, HAM, tata negara, pertahanan dan keamanan, konstitusi dan hukum nasional. Materi ini mulai mewarnai dalam pendidikan dan pengajaran yang disebut kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila mulai hilang dalam proses pengajaran di kelas dan diganti dengan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila tidak lagi menjadi mata pelajaran wajib dan masuk ujian nasional di sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah. Penegasan Tap MPR No.XVIII/MPR/1998 tersebut diperkuat dengan lahirnya UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menghapus mata pelajaran Pancasila dikurikulum pendidikan nasional. Padahal apabila merujuk pada pemikiran Andriani mengatakan bahwa suatu bangsa membutuhkan ideologi sebagai perangkat prinsip pengarah (*guiding principles*), yang dijadikan dasar serta

memberikan arah dan tujuan untuk dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara (Andriani, 2016:41). Sejak mata pelajaran pendidikan Pancasila dihapuskan terjadi kekosongan ideologis di ranah akademik dan pendidikan kemudian mulai masuknya berbagai ideologi lain masuk ke dunia pendidikan. Dunia pendidikan menjadi arena kontestasi ideologi lain dan mengubah wajah pendidikan nasional menjadi ajang perebutan pengaruh ideologis yang tidak sesuai dengan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia.

Paska pendidikan Pancasila tidak diajarkan di dunia pendidikan berbagai gejala dan fenomena sosial mulai muncul khususnya berbagai gejolak konflik sosial, politik, dan ideologis membawa instabilitas keamanan dan politik di Indonesia. Ketegangan sosial dan konflik mulai datang silih berganti sejak penghapusan Pancasila dari mata pelajaran wajib di dunia pendidikan. Pendidikan Pancasila yang diajarkan di perguruan tinggi menjadi tidak konsisten dalam upaya membangun nilai-nilai kebangsaan. Justru Pancasila diperdebatkan dan dipermasalahkan dalam diskursus-diskursus akademik yang berdampak pada reduksi nilai-nilai kebangsaan. Para pendidikan Pancasila kehilangan orientasi dan titik pijak dalam mengajarkan pendidikan Pancasila. Kondisi ini berjalan sampai kurang lebih 9 tahun, kemudian muncul peraturan baru melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengamanatkan kembali pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi masuk menjadi kurikulum wajib. Ironisnya, dalam prakteknya banyak perguruan tinggi belum konsisten melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut. Berbagai model pendidikan Pancasila yang ditawarkan di kelas-kelas masih belum menunjukkan penguatan akan nilai-nilai kebangsaan. Begitu juga, para pendidik belum mendapatkan penyegaran akan nilai-nilai Pancasila kembali setelah paska reformasi selama 20 tahun berlangsung. Metode dan materi ajar pendidikan Pancasila kemudian berjalan tanpa arah dan kecenderungan berubah-ubah tanpa bentuk dan tujuan yang jelas.

3. Model Pendidikan Pancasila di UPN Veteran Yogyakarta

Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN Veteran) Yogyakarta sejak menegaskan sebagai kampus bela negara memiliki peran dan sumbangsih untuk mendidik generasi muda memiliki jiwa-jiwa bela negara dan nasionalisme yang tinggi. Pendidikan Pancasila menjadi salah satu pintu utama untuk mewujudkan dan mengembangkan kader-kader bela negara berjati diri dan berkepribadian berdasarkan nilai-nilai Pancasila. UPN Veteran Yogyakarta juga mendirikan Pusat Studi Pancasila pada tahun 2018 ini sebagai upaya untuk mendukung kampus bela negara melalui pengembangan pendidikan Pancasila yang terintegrasi dan penguatan kapasitas pendidik Pancasila di UPN Veteran Yogyakarta. Berikut ini model Pendidikan Pancasila di UPN Veteran Yogyakarta.

a. Muatan materi Pancasila

Muatan materi Pancasila yang dikembangkan di UPN Veteran Yogyakarta mengacu pada materi standar yang diberikan oleh DIKTI terkait Pancasila kemudian diperkuat dengan materi historisitas Pancasila sebagai dasar negara, mengapa negara Indonesia berdasarkan Pancasila, dasar-dasar argumentasi negara Indonesia berdasarkan Pancasila, serta alasan Apa sebab negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Materi Pancasila tidak hanya dari sumber DIKTI tetapi juga sumber-sumber primer terkait dengan kepancasilaan menjadi dasar pengembangan materi Pancasila di UPN. Pusat Studi Pancasila UPN Veteran Yogyakarta sedang berproses untuk melakukan kajian dan pengembangan materi Pancasila di UPN agar sesuai dengan kebutuhan dan konteks dalam kerangka membangun nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, materi pendukung ialah WIMAYA merupakan materi untuk memperkuat nilai-nilai bela negara dan nilai-nilai patriotisme.

b. Strategi pembelajaran

Strategi pembelajaran yang dikembangkan untuk materi Pendidikan Pancasila ialah melalui pembelajaran interaktif, diskusi, presentasi, tugas terstruktur dan independen dengan mengunjungi dan mengeksplorasi museum, penulisan kreatif tentang Pancasila, menarasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk kegiatan dan model kelas kreatif dan dialektis. Kebutuhan akan pemberian

materi dan konsep-konsep dasar tentang Pancasila tetap diperlukan karena generasi milenial perlu memahami Pancasila secara mendasar. Sehingga, materi ini menjadi pembuka dan penuntun bagi mahasiswa untuk masuk memahami nilai-nilai kebangsaan berdasarkan hasil dari refleksi dan perenungan mahasiswa. Mahasiswa diarahkan untuk memiliki portofolio dalam hasil karya akhir seperti video, vlog, dan karya tulis esai atau puisi tentang kepancasilaan.

c. Evaluasi pembelajaran

Capaian pembelajaran pendidikan Pancasila di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta ialah mahasiswa mampu memberikan penilaian dan dapat memaknai hakekat pendidikan Pancasila bagi pembangunan nilai-nilai kebangsaan. Evaluasi pembelajaran diukur dan nilai dari partisipasi mahasiswa aktif di kelas, mengembangkan materi Pancasila yang ada melalui hasil dari diskusi, presentasi, esai, produk karya nyata secara bertahap dapat dibaca dan disumbangkan kepada masyarakat umum. Hasil yang diharapkan mahasiswa dapat menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila menurut cara mereka sendiri.

KESIMPULAN

Keberadaan pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi menjadi penting dan strategis dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda. Posisi dan peran Pendidikan Pancasila yang selama ini berkembang perlu diperkuat dan ditingkatkan melalui standar mutu yang bertujuan untuk tidak hanya sekedar mengenal Pancasila tetapi menghayati dan membangun nilai-nilai kebangsaan. UPN V Yogyakarta mengembangkan pendidikan Pancasila bertujuan untuk membangkitkan loyalitas dan nasionalisme bagi generasi muda sebagai tujuan utama dari kerangka besar pendidikan Pancasila yang ada selama ini.

Saran-Saran

Harapannya kedepan pendidikan Pancasila mampu melahirkan generasi muda yang nasionalis. Untuk itu, penguatan kapasitas pendidik, penyegaran materi dan metode diperlukan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Ana. 2016. *Posisi Nilai Pancasila pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembentukan Karakter Bangsa*. CIVICUS, Vol. 20, No. 2 Desember, 2016. Hal. 40-56.
- Asmaroini, Ambiro Puji. 2016. *Implementasi Nilai-nilai Pancasila bagi Siswa di Era Globalisasi*. CITIZENSHIP, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4, No.2, April 2016. Hal.440-450.
- Kaelan. 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Paradigma.
- Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa).
- Ketetapan MPR RI No.II/MPR/1978 dicabut melalui Ketetapan MPR RI No.XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan TAP MPR No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.
- Sutono, Agus. 2015. *Meneguhkan Pancasila sebagai Filsafat Pendidikan Nasional*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume V, No 1, Januari 2015, hal.666-678.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Internet:

- <https://news.detik.com/berita/2125635/lima-kasus-konflik-sosial-terburuk-pasca-1998>, diakses 9 Juni 2018 16:59.
- <http://mediaindonesia.com/read/detail/126861-2002-tragedi-bom-bali-1>, diakses 9 Juni 2002 17:02.
- <https://www.liputan6.com/global/read/2329497/1-10-2005-bom-bali-2-renggut-23-nyawa>, diakses 9 Juni 2002 17:02.